

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan aktivitas yang selalu dilakukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dan berinteraksi dengan komunikasi. Komunikasi kemudian menjadi komponen yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi maupun komunikasi massa.

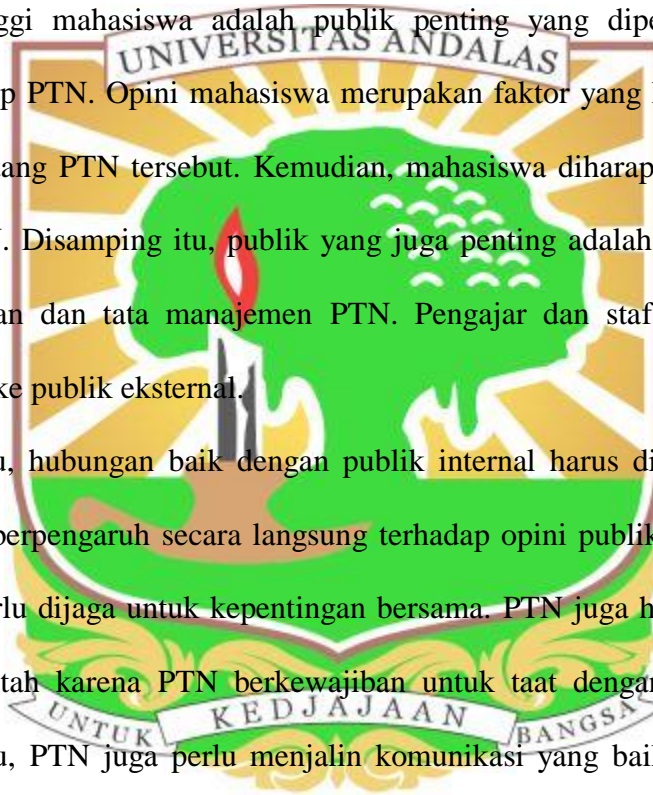
Komunikasi juga terjadi di perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Secara garis besar di Indonesia ada dua jenis perguruan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disingkat dengan PTN) dan perguruan tinggi Swasta (selanjutnya disingkat dengan PTS). PTN merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara itu PTS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Perbedaan komunikasi di perguruan tinggi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dapat dilihat dari publik yang menjadi komponen komunikasi. Publik kemudian dapat dipahami sebagai *stakeholder* yang merupakan individu maupun kelompok di dalam atau di luar perguruan tinggi yang merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat bertahan jika mampu menghadapi persaingan antar perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena realitas mengenai perguruan tinggi

yang tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, namun juga sebagai lembaga bisnis (Sulistyaningtyas, 2007). perguruan tinggi sebagai lembaga bisnis harus mampu berkompetensi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkompeten sehingga perguruan tinggi dapat tetap mempertahankan eksistensinya.

PTN juga tidak memiliki otoritas dalam menentukan anggaran rumah tangga dan keuangannya apabila belum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Selain itu di perguruan tinggi mahasiswa adalah publik penting yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup PTN. Opini mahasiswa merupakan faktor yang kuat dalam menentukan tanggapan publik tentang PTN tersebut. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat menjadi duta yang baik untuk PTN. Disamping itu, publik yang juga penting adalah pengajar dan staf yang mengelolah pendidikan dan tata manajemen PTN. Pengajar dan staf juga berperan sebagai perwakilan dari PTN ke publik eksternal.

Oleh sebab itu, hubungan baik dengan publik internal harus dijaga PTN karena opini publik internal akan berpengaruh secara langsung terhadap opini publik eksternal. Komunikasi yang baik di PTN perlu dijaga untuk kepentingan bersama. PTN juga harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah karena PTN berkewajiban untuk taat dengan aturan dan ketentuan pemerintah. Selain itu, PTN juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan media. Sebab media adalah modal komunikasi perguruan tinggi dengan publik internal maupun eksternal. Sementara itu, koordinasi dengan pihak media di PTN adalah hal yang sulit dilakukan karena kebebasan kepemilikan dan akademik di PTN. Saluran komunikasi di perguruan tinggi adalah Hubungan Masyarakat (selanjutnya disingkat Humas). Kemudian hal ini menjadi tantangan bagi Humas di PTN karena persepsi media akan berkaitan dengan pekerjaan Humas.



Komunikasi organisasi secara praktik berlangsung di Humas PTN dalam aktivitas pekerjaannya. Komunikasi yang dilakukan Humas sebagai alat manajemen akan mempengaruhi pekerjaan Humas sebagai alat komunikasi. Hal ini menjadi menarik karena Humas di PTN tidak pernah ditempatkan pada posisi yang eksklusif karena mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah. Faktanya dengan posisi tersebut Humas harus tetap menjalankan tugas dan fungsi komunikasi dengan efektif.

Humas di PTN juga menarik untuk diteliti dari segi komunikasi yang dilakukan karena terdapat beberapa tantangan khusus di perguruan tinggi. Berdasarkan pernyataan Cutlip dan Center (dalam Luqman, 2013), perguruan tinggi menghadapi empat masalah dalam komunikasi, yaitu: 1) Dukungan dana yang tidak memadai untuk menjalankan peran sebagai institusi publik dalam masyarakat luas. 2) Kompetensi untuk mendapatkan mahasiswa yang berkualitas perlu semangat dan mahal. 3) Kendala dan peraturan membuat administrasi perguruan tinggi sulit dan memerlukan biaya. 4) Kebebasan akademik dan kepemilikan adalah tantangan untuk *stakeholder* internal maupun eksternal.

Di Kota Padang terdapat dua PTN yang telah mendapatkan akreditasi A dalam kategori penilaian perguruan tinggi. Diantaranya adalah Universitas Andalas (selanjutnya disingkat Unand) mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN PT) pada tahun 2014 berlaku hingga tahun 2019 (*Idntimes.com*). Selanjutnya, Universitas Negeri Padang (UNP) yang mendapatkan akreditasi A pada tahun 2016 dan berlaku hingga tahun 2021 (*website UNP*).

Tidak hanya menjadi perguruan tinggi yang terpadang baik oleh pemerintah. Namun kedua PTN ini juga menunjukkan potensi dari keterbukaan informasi di mana Humas berperan penting dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada tahun 2015 dan 2016,

Unand meraih peringkat pertama dalam hal keterbukaan informasi secara berturut-turut tingkat Provinsi Sumatera Bart. Namun, pada tahun 2017 PPID Unand kehilangan posisinya bahkan tidak masuk tiga besar sementara itu UNP yang masih 1 tahun mendapatkan akreditasi A kala itu mampu meraih peringkat kedua di tahun 2017 (*website UNP*).

Perubahan posisi tersebut di atas sejalan dengan penurunan persentase keberhasilan dari program kerja yang dilakukan oleh Humas Unand dari tahun 2014-2017.

Tabel 1.1.
Program Kerja Humas UNAND Tahun 2014-2017

Tahun	Program Kerja	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Persentase Keberhasilan
2014	9	6	3	66,6 %
2015	14	9	5	64,2 %
2016	19	10	9	52,6 %
2017	12	5	7	41,6 %

Sumber: Hasil olahan peneliti

Perubahan hasil peringkat pada prestasi PPID kedua PTN ini tentu dipengaruhi oleh aktivitas internal organisasi yang terjadi melalui komunikasi organisasi. Jika ditelusuri lebih lanjut, kedua Humas PTN ini berperan sebagai mediator dalam PPID. Seperti simpulan yang telah diteliti dalam jurnal Ratnasari (2018) Humas berperan aktif sebagai mediator dalam upaya mencapai pelaksanaan keterbukaan informasi PTN.

Di samping itu, apabila diperhatikan kedua Humas berada pada posisi Esselon IV (bagian terbawah) pada struktur organisasi di PTN. Posisi Humas tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan dari pemerintah. Selain itu itu, Humas kedua PTN ini berada pada subbagian divisi yang memberikan anggaran terbatas dalam menjalankan program kerja Humas.

Namun, Humas harus tetap menunjukkan profesionalitas dan kemampuan untuk menjalankan program kerja dan menjaga hubungan baik dengan publik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik perhatian peneliti yaitu kemampuan Humas untuk bertahan dan meningkatkan prestasi di tengah arus persaingan yang semakin tinggi. Begitu pula dengan program kerja yang harus dilaksanakan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tentunya dalam proses implementasi program kerja, kedua Humas PTN ini tidak akan luput dari komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi akan terus berlangsung selama adanya aktivitas di dalam Humas.

Komunikasi yang terus menerus terjadi di dalam suatu organisasi akan menimbulkan suatu sistem atau pola komunikasi organisasi. Pola komunikasi organisasi yang baik akan menentukan proses komunikasi dapat berjalan efektif atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Romli, bahwa komunikasi organisasi yang baik dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak internal maupun eksternal. Jika sebuah organisasi sampai pada titik di mana komunikasi dalam organisasi tidak seefektif yang seharusnya, organisasi itu tidak akan berfungsi seefektif seharusnya (Romli 2014). Identitas atau nilai yang terbentuk juga akan bergantung pada pola komunikasi yang telah dibuat juga merefleksikan bentuk hasil komunikasi antar pimpinan dan staf dalam melaksanakan seluruh program kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan melihat begitu pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi maka peneliti ingin mengetahui bagaimana **“Pola Komunikasi Humas PTN Terakreditasi A di Kota Padang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pola komunikasi Humas PTN terakreditasi A di Kota Padang saat melakukan komunikasi Organisasi?
2. Apa saja hambatan Humas PTN terakreditasi A di Kota Padang dalam menjalankan komunikasi organisasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas komunikasi organisasi Humas PTN terakreditasi A di Kota Padang dalam menjalankan komunikasi organisasi.
2. Untuk mendeskripsikan fungsi komunikasi organisasi Humas PTN terakreditasi A di Kota Padang dalam menjalankan komunikasi organisasi.
3. Untuk mendeskripsikan media komunikasi yang digunakan Humas PTN terakreditasi A di Kota Padang dalam menjalankan komunikasi organisasi.
4. Untuk mendeskripsikan pola komunikasi Humas PTN Terakreditasi A di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Humas PTN terakreditasi A di Kota Padang saat melakukan aktivitas komunikasi organisasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang berminat pada kajian komunikasi Humas dengan masalah yang berbeda.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pola komunikasi organisasi khususnya pada Humas.

1.4.2. Manfaat Praktis



Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi praktisi Humas maupun organisasi dalam menghadapi kendala komunikasi organisasi agar komunikasi organisasi tetap berjalan dengan efektif.

